

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021**



**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

Alamat : Jl. Jenderal Soedirman No.175
Telepon : 891334 Faximile : (0281) 6597252,
email : bkd@purbalingga.go.id
PURBALINGGA 53316

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021
12. Peraturan Bupati Purbalingga No. 62 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- KEDUA** : Uraian mengenai Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan :
- a. RKA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;;
 - b. DPA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- KEEMPAT : Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai alat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- KELIMA : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : Juli 2020

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERIYANTO, S.Pd, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680214 199103 1 014

Kata Pengantar

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal dan eksternal, serta adanya pergeseran atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai suatu kondisi yang ingin diwujudkan menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan seperti tersebut di atas harus berdasarkan skala prioritas yang tajam sesuai urgensi dan tingkat pengaruhnya terhadap capaian dan tujuan pembangunan daerah tersebut, serta terhadap pelaksanaan misi dan terwujudnya visi Daerah.

Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pembangunan harus diupayakan agar setiap program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan saling bersinergi satu dengan yang lain, serta harus mampu memanfaatkan anggaran secara efisien dan mengutamakan orientasi setiap kegiatan kepada pencapaian sasaran dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Ppendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga 2021.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Ppendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga 2021.yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 dan guna memenuhi Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pubalingga, Juli 2020

**Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Purbalingga**



HERIYANTO, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680214 199103 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019...	4
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019	4
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020	11
BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021	15
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	15
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Purbalingga	15
C. Program dan Kegiatan	17
BAB V. PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan dan memuat rancangan prioritas pembangunan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu **“ Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**. Visi tersebut diyakini mengakomodir tugas pokok dan fungsi BKPPD.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pembangunan bidang Kepegawaian ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten yaitu pada misi ke-1 sebagai berikut **Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat**

Atas dasar Visi dan Misi tersebut selanjutnya telah dikembangkan kebijakan pembangunan bidang Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan, yang diharapkan dapat dijadikan tumpuan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu : peningkatan pelayanan kenaikan pangkat, pensiun,

Substansi Renja OPD setidaknya memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yaitu Renja tahun 2021, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 serta Rencana program dan kegiatan prioritas BKPPD Kabupaten Purbalingga tahun 2021

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Daerah (BKPPD) Kabupaten Purbalingga adalah untuk :

1. Menjabarkan Renstra BKPPD Tahun 2016-2021 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan, Prioritas dan Plafon anggaran BKPPD Kab. Purbalingga tahun anggaran 2021
3. Menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2021
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan serta

mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya pembangunan.

D. SISTEMATIKA RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

- I. Pendahuluan
Memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sistematika penyusunan Renja BKPPD Tahun 2021.
- II. Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019
- III. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020
- IV. Rencana Program dan Kegiatan BKPPD Tahun 2021
- V. Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

A. Evaluasi pelaksanaan Renja BKPPD Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019

1. Realisasi anggaran BKPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2019, BKPPD Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 2 (dua) program utama dengan 29 (Dua puluh sembilan) kegiatan yang didukung anggaran belanja sebesar Rp. 13.051.866.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), terdiri dari :

- 1) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp.4.364.937.000,- dengan realisasi sebesar Rp.,4.173.313.742- terdapat selisih sebesar Rp.191.623.258,- terdiri dari Gaji pegawai sebesar Rp. 22.853.258- Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp.168.770.000-

Tabel II.1 :
Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian/Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.675.312.000,	2.652.458.742	22.853.258	99,15
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.689.625.000,	1.520.855.000	168.770.000	90,01
Jumlah		4.364.937.000,	4.173.313.742	191.623.258	95,61

- 2) **Belanja Langsung** sebesar Rp.8.686.929.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.812.724.037,- atau sebesar 89,94%, terdapat selisih dan atau efisiensi sebesar Rp.874.204.963,- terdiri dari selisih beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Anggaran belanja pegawai sebesar Rp.200.082.500,- tidak dapat dipergunakan yang berasal dari Honorarium PNS
- b. Anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.674.002.463,- tidak dipergunakan terdiri dari :
 1. Belanja bahan pakai habis sebesar Rp.30.652.500 -
 2. Belanja Jasa Kantor Rp.232.006.635 -

3. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp.164.709.858,-
 4. Belanja pemeliharaan sebesar Rp.7.324.500,-
 5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp.113.179.394,-
- c. Anggaran belanja modal sebesar Rp.120.000,- yang berasal dari sisa pembelian belanja peralatan mesin- pengadaan komputer

Untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam tabel penggunaan anggaran belanja BKPPD T.A. 2019 sebagai berikut :

**TABEL II.2 :
BELANJA BKPPD KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Selisih	%
1	2	3	4	5
BELANJA	13.051.866.000	11.986.037.779	1.065.828.721	91,83
BELANJA OPERASI	12.954.966.000	11.889.257.779	1.065.708.221.001	91,71
Belanja Pegawai	5.163.535.000	4.771.829.242	391705.758	92,41
Belanja Barang dan Jasa	7.791.431.000	7.117.428.537	674;002463	91,35
BELANJA MODAL	96.900.000	96.780.000	120.000	99,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.900.000	96.780.000	120.000	99,,88
Jumlah	13.051.866.000	11.986.037.779	1.065.828.721	91,83

**Tabel II.3 :
Realisasi Anggaran Belanja Langsung**

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1		2	3	4	5
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	399.985.000	310.273.104	77,57

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1		2	3	4	5
	2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	132.786.000	131.390.814	98,95
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	185.517.000	160.139.425	86,32
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	100.000.000	99.785.100	99,79
	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000	9.240.000	92,40
Fasilitai dan Pengembangan Kepegawaian Daerah	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5.441.000.000	5.266.649.000	96,80
	2	Pengadaan CPNS	641.650.000	229.912.055	35,83
	3	Assesment PNS	310.425.000	308.345.000	99,33
	4	Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan	497.115.000	460.479.512	92,63
	5	Fasilitasi kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan PTT	211.436.000	188.111.180	88,97
	6	Peningkatan Kapasitas kompetensi ASN	110.000.000	109.390.000	99,45
	7	Penyusunan Formasi CPNS	70.000.000	59.476.800	84,97
	8	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	55.000.000	37.837.007	68,79
	9	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	52.000.000	51.946.000	99,90
	10	Fasilitasi Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Pilihan	39.000.000	38.768.750	99,41
	11	Penyusunan Indeks Profesionalitas Pegawai	30.000.000	23679.401	78,93
	12	Fasilitasi pengurusan administrasi pensiun	37.170.000	36.473.100	98,13
	13	Pemutakhiran program dan data SIMPEG	50.000.000	49.167.000	96,33

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1		2	3	4	5
	14	Penyusunan buku profil PNS	17.000.000	16.270.000	95,71
	15	Fasilitasi pengurusan administrasi mutasi PNS	17.000.000	15.735.000	92,56
	16	Penataan file kepegawaian	15.000.000	14.183.100	94,55
	4	Fasilitasi masalah kepegawaian dan pemantauan disiplin PNS	59.387.000	53.367.000	89,86
	5	Pengelolaan Administrasi PTT	57.293.000	48.198.000	84,13
	6	Penyusunan standar SKP	73.163.000	41.924.681	57,30
	7	Pengelolaan administrasi jabatan fungsional	15.000.000	14.491.306	96,61
	8	Pelaksanaan E-Kinerja	60.000.000	37.491.610	62,40
J U M L A H			8.686.929.000	7.812.724.037	89,94

2. Capaian Renstra BKPPD Tahun 2019

Hingga akhir tahun 2019 BKPPD telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu **Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur**[™], dengan sasaran strategisnya :

- 1) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur dengan indikator :
 - a. Persentase penempatan SDM ASN sesuai formasi dan kompetensi
 - b. Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya
- 2) Meningkatkan kinerja ASN dengan indikator rata-rata nilai SKP ASN

Untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis BKPPD Kabupaten Purbalingga tahun 2019 tersaji dalam matrik dibawah ini, yaitu :

**Tabel II.4 :
Rata-rata Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis BKPPD Tahun 2019**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	74	76	75,39	99,2	94,,23
	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur	Persentase Penempatan ASN sesuai Formasi dan Kompetensi	Persentase	NA	60	95,3	158,8	136
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	Persentase	NA	70	100	142,86	125
	Meningkatnya kinerja ASN	Rata-Rata Nilai SKP ASN	Nilai	76	77	86,2	111,9	106,4
Rata – rata Capaian Kinerja				128,2 (sangat berhasil)				

Dari Tabel II.4 di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPPD Kabupaten Purbalingga di tahun 2019 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 128,2% atau kategori "*sangat berhasil*"

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas

ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip *good governance*. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Untuk mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara secara umum digunakan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, dan pelanggaran disiplin melalui perhitungan profesionalitas pada 4 (empat) dimensi yaitu :

- Dimensi Kualifikasi
- Dimensi Kompetensi
- Dimensi Kinerja
- Dimensi disiplin

Meskipun tingkat capaian tujuan dan sasaran strategis masuk dalam kategor *"sangat berhasil"*, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui, yaitu :

- (a) Masih terbatasnya menu/modul aplikasi pada Sistem Manajemen Kepegawaian (E-Kepegawaian) yaitu baru tersedia modul E-personal
- (b) Laptop yang kurang untuk melakukan verifikasi dan supervisi seleksi administrasi pengadaan CPNS dikarenakan semua sistem penerimaan CPNS melalui on line
- (c) Listrik yang sangat mendesak untuk ditambah daya dikarenakan sering padam.
- (d) Belum tersedianya Genset, alat ini sangat diperlukan untuk proses kelancaran verifikasi dan supervisi data pelamar dalam penerimaan CPNS, hal ini dikarenakan sering terjadi pemadaman listrik, sehingga sangat mengganggu kelancaran tugas
- (e) Kurang adanya respon atau komitmen dari OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menginput data kepegawaian di masing-masing

OPD melalui sistem E-kepegawaian yang telah disediakan, sehingga sering terjadi keterlambatan update data kepegawaian di BKPPD.

- (f) Penilaian kinerja berbasis elektronik belum dapat dilaksanakan karena belum adanya anggaran dan sistem yang menggabungkan penilaian kinerja dan tunjangan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka BKPPD Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

- (a) Segera mengusulkan anggaran untuk penambahan modul Aplikasi pada sistem Manajemen Kepegawaian yaitu modul E- KGB E- ijin Belajar E- Mutasi, E- Fasilitas (Karis Karsu, KPE, Taspen) E-Jabatan, E- Diklat, E- Hukdis, E- Baperjakat, E- Pensiun
- (b) Segera mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pengadaaan sarpras tersebut diatas pada tahun anggaran 2022.
- (c) Bersurat kepada semua OPD utntuk mengupdate data kepegawaiannya melalui aplikasi sistem manajemen E-Kepegawaian.
- (d) Merumuskan kebijakan pemberian tunjangan kinerja berbasis "Penilaian kinerja secara elektronik"

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KAB. PURBALINGGA
TAHUN 2020

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, BKPPD menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKPPD, yaitu : " Meningkatkan Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur"

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur dengan indikator :
 - a) Persentase penempatan SDM ASN sesuai formasi dan kompetensi
 - b) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya
2. Meningkatkan kinerja ASN dengan indikator rata-rata nilai SKP ASN.

Strategi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada tujuan, sesuai dengan kurun waktu 5 tahun mendatang.

Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah :

1. Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karier yang jelas ;
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan atau Standart Operational Procedures (SOP) ;
3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan ;
4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung reward and punishment.

Arah Kebijakan BKPPD

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan tujuan manajemen Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur;
2. Terlaksananya tes PCAP dan QAP bagi Pejabat Struktural ;
3. Pembinaan Disiplin PNS ;
4. Terselenggaranya E-Personal System PNS Kabupaten Purbalingga
5. Terselenggaranya ruang pelayanan informasi kepegawaian

Prioritas BKPPD

Prioritas daerah pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana;
Sebaik apapun kualitas aparatur tanpa didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai tidak akan mencapai suatu tingkatan kinerja yang optimal. Sebagai konsekuensinya dalam rangka terwujudnya profesionalisme pegawai dalam arti agar menghasilkan kinerja yang optimal maka diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan aspek prioritas disamping upaya peningkatan aspek kuantitas, mengingat dinamika dan perubahan masyarakat yang perkembangannya semakin cepat sebagai dampak langsung dari percepatan era informasi dan globalisasi. Di sisi lain aspek kualitas juga sangat memerlukan adanya peningkatan profesionalisme, tanggungjawab, kejujuran, dan keadilan dalam rangka membentuk pegawai yang responsif, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian;

Dalam manajemen kepegawaian, aspek administrasi merupakan aspek penentu dari proses manajemen. Oleh karena itu tertib administrasi menjadi suatu keharusan bagi terwujudnya kelancaran dalam proses manajemen kepegawaian.

4. Penyediaan informasi kepegawaian yang tepat dan akurat.

Ketersediaan informasi yang tepat dan akurat sangat penting dalam rangka membuat kebijakan yang efektif, baik tepat dalam hal waktu, jenis informasi ataupun sumbernya.

Dari prioritas tersebut diatas dituangkan dalam Program dan Kegiatan-kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatannya :
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Administrasi Umum
 - d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
2. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kepegawaian Daerah dengan kegiatannya:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 - b. Pengadaan CPNS
 - c. Assesment PNS
 - d. Seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan
 - e. Asilitasi Kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan PTT
 - f. Peningkatan Kapasitas Kompetensi ASN
 - g. Penyusunan ormasi PNS
 - h. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - i. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS
 - j. Asilitasi Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Pilihan
 - k. Penyusunan Indeks Profesionalitas Pegawai ASN
 - l. Fasiitasi Pengurusan Administrasi Pensiun
 - m. Pemutakhiran Program dan Data SIMPEG
 - n. Penyusunan Buku Profil PNS
 - o. Fasilitasi Pengurusan Admintrasi mutasi PNS

- p. Penataan ile Kepegawaian
- q. Fasiitasi Masalah Kepegawaian dan Pemantauan Disiplin PNS
- r. Pengelolaan Admintrasi PTT
- s. Penyusunan Standarisasi SKP
- t. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional
- u. Pelaksanaan E-Kinerja

Tabel 5
Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Program		Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Bahan & Jasa Perkantoran	322.962.000	
		2.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	31.068.000	
		3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	89.278.000	
		4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	6.643.000	
2.	Program Fasilitasi dan Pengembangan Kepegawaian Daerah	1.	Pengelolaan Administrasi Jabatan	9.454.000	
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	35.715.000	
		3.	Pengadaan CPNS	1.267.753.000	
		4.	Assesment PNS	4.629.000	
		5.	Fasilitasi Kepesertaan BPJS	201.724.000	
		6.	Peningkatan Kapasitas Kompetensi	0	Refocusing
		7.	Penyusunan Formasi PNS	32.085.000	
		8.	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	28.937.000	
		9.	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	22.295.000	
		10.	Fasilitasi Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Pilihan	15.786.000	
		11.	Pelaksanaan E-Kinerja	0	Refocusing
		12.	Penyusunan Indeks Profesionalitas Pegawai ASN	1.248.000	
		13.	Fasilitasi Pengurusan Administrasi	13.637.000	
		14.	Pemutakhiran Program dan Data SIMPEG	749.000	
		15.	Penyusunan Buku Profil PNS	0	Refocusing
		16.	Fasilitasi Pengurusan Administrasi Mutasi PNS	13.171.000	
		17.	Penataan File Kepegawaian	0	Refocusing
		18.	Fasilitasi Masalah Kepegawaian dan Pemantauan Disiplin PNS	1.963.000	
		19.	Pengelolaan Administrasi PTT	3.837.000	
JUMLAH				2.102.934.000	

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2021

I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Tabel 6 :
Telaah Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB :

No	Sasaran Jangka Menengah Kemenpan RB	Permasalahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	menuntaskan penetapan berbagai kebijakan sebagai fondasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Smart ASN	Kurang optimalnya Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme ASN	Masih belum adanya pola karier yang jelas	Rencana pengadaan/ pelaksanaan berbagai macam Bimbingan Teknis bagi ASN
2.	memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	Kurang optimalnya Kinerja ASN	Selain SKP, ukuran keberhasilan kinerja ASN belum sepenuhnya terukur	Adanya E-Kinerja memungkinkan terukurnya Kinerja ASN pada saatnya nanti
3.	memperluas pembangunan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani			

II. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga

Pembangunan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dilakukan melalui misi ke-1, yaitu : *"Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima Kepada Masyarakat"* Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karier yang jelas, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan atau Standart Operational Procedures (SOP), Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan, Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung reward and punishment.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 1 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah : " Meningkatkan Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur". dengan indikator kinerja, yaitu Angka Indeks Profesionalisme ASN.

Tabel 7 :
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
BKPPD Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	1. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur	- Persentase Penempatan SDM ASN sesuai Formasi dan Kompetensi	1. Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karier yang jelas;	1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur; 2. Terselenggaranya tes PCAP dan

			- Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	2. Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan atau Standart Operational Procedure (SOP);	QAP bagi pejabat struktural;
		2. Meningkatnya Kinerja ASN	- Rata-rata Nilai SKP ASN	3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan;	3. Pembinaan disiplin PNS;
				4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung reward and punishment.	4. Terselenggaranya E-personal System PNS Kabupaten Purbalingga;
					5. Terselenggaranya ruang pelayanan informasi kepegawaian.

III. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Kepegawaian Daerah;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan;
- 3) Administrasi Umum;
- 4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2. Program Kepegawaian Daerah :

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi ASN;
- 2) Administrasi Kepegawaian;
- 3) Peningkatan Kapasitas ASN;
- 4) Pengembangan Karis ASN;
- 5) Pembinaan ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :

- 1) Pengembangan Kompetensi Teknis;
- 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2021 tersaji dalam matrik di bawah ini :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Purbalingga
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jenis Belanja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.000)
					BL	B. Pegawai				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN				8.548.313.000	4.841.282.000				6.143.177.700
4 01	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				743.425.000	4.841.282.000				6.143.177.700
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				539.243.700	4.841.282.000				6.143.177.700
4 01 01 2,01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.199.600	-				23.319.670
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : 1. Renstra 2. Renja	BKPPD	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	13.472.600					14.819.860
4 01 01 2,01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen 1. LKPJ 2. LKJIP 3. Laporan 3 Tribulanan 4. RTP 5. LPPD 6. Road Map PMPRB	BKPPD	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 4 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen	7.727.100					8.499.810
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan				14.500.000	4.841.282.000				5.341.360.200

4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tamsil PNS Inspektorat Daerah 41 pns	BKPPD	14 bulan		4.841.282.000				5.325.410.200
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggarakannya perjalanan dinas dalam daerah	BKPPD	12 bulan		11.000.000				12.100.000
4	01	01	2,02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan SKPD	BKPPD	1 dokumen		3.500.000				3.850.000
4	01	01	2,03		Administrasi Umum					483.544.000				531.898.400
4	01	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko/materai, jasa pos/pengiriman/paket	BKPPD	12 Bulan		490.000				539.000
4	01	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya :1. Telepon2. Daya/ Langganan listrik3. Langganan air PDAM, 4. Internet	BKPPD	12 Bulan		95.400.000				104.940.000
4	01	01	2,03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Publikasi (banner), dekorasi, hiburan/rias, pengemudi, sewa pengharum ruangan, sewa baju	BKPPD	12 Bulan		17.400.000				19.140.000
4	01	01	2,03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pembayaran BPKB, STNK, dan honor THL sopir	BKPPD	12 Bulan		20.800.000				22.880.000
4	01	01	2,03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor Pengelolaan Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Operator Simda/Simbangda	BKPPD	12 Bulan		59.800.000				65.780.000
4	01	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	BKPPD	12 Bulan		37.020.000				40.722.000
4	01	01	2,03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tercukupinya pemeliharaan listrik, telepon, air minum, peralatan kantor, jaringan, dan tanaman	BKPPD	12 Bulan		5.370.000				5.907.000
4	01	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercukupinya Alat Tulis Kantor	BKPPD	12 Bulan		25.096.000				27.605.600

4	01	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya Jasa Cetak dan Penggandaan	BKPPD	12 Bulan	18.400.000					20.240.000
4	01	01	2,03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	BKPPD	12 Bulan	3.599.000					3.958.900
4	01	01	2,03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BKPPD	12 Bulan	11.910.000					13.101.000
4	01	01	2,03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga, tabung gas dan umbul-umbul, cenderamata/karangan bunga, bibit tanaman, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	BKPPD	12 Bulan	1.970.000					2.167.000
4	01	01	2,03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	BKPPD	12 Bulan	2.280.000					2.508.000
4	01	01	2,03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya BBM kendaraan	BKPPD	12 Bulan	74.291.000					81.720.100
4	01	01	2,03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan makan/minum tamu dan rapat	BKPPD	12 Bulan	16.035.000					17.638.500
4	01	01	2,03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terseleenggarakannya perjalanan dinas luar daerah	BKPPD	12 Bulan	48.100.000					52.910.000
4	01	01	2,03	19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya pemeliharaan rutin Gedung Kantor (Pengecatan,dll)	BKPPD	12 Bulan	25.342.000					27.876.200
4	01	01	2,03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya pemeliharaan kendaraan dinas (servis, ganti oli, ganti suku cadang, dll)	BKPPD	12 Bulan	20.141.000					22.155.100
4	01	01	2,03	38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		BKPPD	12 Bulan	100.000					110.000
4	01	01	2,04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-					-
4	01	01	2,04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersewanya pakaian khusus hari tertentu	BKPPD		-					-
4	01	01	2,04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal				20.000.000					22.000.000
5	03				KEPEGAWAIAN				2.251.199.300					2.476.319.230

5	03	02			KEPEGAWAIAN DAERAH					2.251.199.300					2.476.319.230
5	03	02	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN					72.689.000	-				79.957.900
5	03	02	2.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Tersedianya SIM ASN yang semakin lengkap	BKPPD			61.336.000					67.469.600
5	03	02	2.01	02	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	- Tersusunnya arsip file kepegawaian PNS secara lengkap- Tersusunnya Buku Profil- Terselesaikannya SK Pengangkatan, kenaikan dan pembebasan Jabatan Fungsional	BKPPD			11.353.000					12.488.300
5	03	02	2,02		Administrasi Kepegawaian		BKPPD			1.432.675.300					1.575.942.830
5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersusunnya kebutuhan Formasi dan terlaksananya pengadaan ASN	BKPPD			1.134.909.600					1.248.400.560
5	03	02	2,02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan	- Terselesaikannya seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi - Terselesaikannya SK Mutasi PNS; - Terselesaikannya penataan Jabatan Administrator dan Pengawas - Terselesaikannya Pengangkatan CPNS menjadi PNS	BKPPD			196.201.500					215.821.650
5	03	02	2,02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Terselesaikannya administrasi pemberhentian PNS dan usulan pensiun PNS yang tepat waktu	BKPPD			31.076.000					34.183.600
5	03	02	2,02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terselesaikannya SK Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Pangkat Pilihan	BKPPD			70.488.200					77.537.020
5	03	02	2,03		Peningkatan Kapasitas ASN					375.257.000	-				412.782.700

5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	Meningkatnya Kompetensi Kapasitas ASN melalui workshop, sosialisasi, study banding, training, rakor dll	BKPPD		83.230.000					91.553.000
5	03	02	2,03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Terlaksananya Penilaian Kinerja ASN	BKPPD		20.796.000					22.875.600
5	03	02	2,03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terselesaikannya Ijin Belajar, Tugas Belajar, dan Bantuan Pendidikan bagi PNS yang mengikuti pendidikan lanjut	BKPPD		43.416.000					47.757.600
5	03	02	2,03	08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya pengiriman Dikat Prajabatan/Latsar Golongan II dan III, PKA (Tk. III) dan PKP (Tk. IV) serta Diklat Teknis/fungsional	BKPPD		227.815.000					250.596.500
5	03	02	2,04		Pengembangan Karir ASN				305.122.000		-			335.634.200
5	03	02	2,04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Terselesaikannya assesment PNS terdiri dari seleksi JPT dan seleksi mutasi PNS dari luar kab (Fit and Propertest), QAP/Pemetaan PNS, Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	BKPPD		305.122.000					335.634.200
5	03	02	2,05		Pembinaan ASN				65.456.000		-			72.001.600
5	03	02	2,05	01	Pembinaan Disiplin ASN	- Terlaksananya fasilitasi pemantauan, peningkatan disiplin ASN, mediasi/konseling perceraian dan penghargaan ASN berintegrasi;	BKPPD		34.447.000					37.891.700
5	03	02	2,05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	- Terselesaikannya usulan Satyalencana, KARIS/KARSU, KARPEG, KGB, Taspen, dan LHKPN	BKPPD		31.009.000					34.109.900
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				448.505.000					1493.353.500

BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021, seluruh pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja Tahun 2021 merupakan acuan bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2021 dengan sebaik-baiknya
2. Renja Tahun 2021 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan

4. Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2021 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2021 tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran, oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sangatlah diperlukan.

Akhirnya, semoga cita-cita menggapai Efisiensi kelembagaan dan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara segera dapat terwujud.

Pubalingga, Juli 2020

**Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Purbalingga**

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA" around the perimeter and "BKPPD" in the center. A signature is written over the stamp.
HERIYANTO, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680214 199103 1 014